Upaya Preventif Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dalam Industri Karaoke di Bandar Lampung

Reni Nurviona Ar Vairuz¹, Elly Nurlaili², Kasmawati³

^{1,2,3} Universitas Lampung

e-mail: reninurviona29@gmail.com

Abstrak

Industri karaoke, sebagai bentuk hiburan yang melibatkan lagu atau melodi serta lirik ciptaan, memerlukan perlindungan hukum yang memastikan hak cipta pemegang lagu terlindungi. Tanpa lisensi yang sah, pemutaran lagu dapat melanggar hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya preventif perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan dengan melakukan perjanjian lisensi dan memperpanjang masa berlakunya lisensi agar tidak kedaluwarsa, sehingga pemutaran lagu dapat dilakukan secara sah dan hak cipta pemegang lagu tetap terlindungi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Cipta, Lagu, Royalti*

Abstract

The karaoke industry, as a form of entertainment involving songs or created melodies and lyrics, requires legal protection that ensures the copyrights of song holders are protected. Without a valid license, playing songs may violate copyright. This research aims to identify preventive efforts to protect song copyrights in the karaoke industry in Bandar Lampung. The research results show that preventive efforts are made by entering into a license agreement and extending the validity period of the license so that it does not expire, so that song playback can be carried out legally and the song holder's copyright remains protected.

Keywords: *Legal Protection, Copyright Holders, Songs, Royalties*

PENDAHULUAN

Industri karaoke di Indonesia, termasuk di kota Bandar Lampung, telah berkembang pesat sebagai salah satu bentuk hiburan yang sangat digemari masyarakat. Di balik hiburan yang ditawarkan, terdapat hak cipta lagu yang dilindungi secara hukum. Perlindungan terhadap hak cipta lagu dalam industri karaoke sangat penting, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak para pencipta lagu untuk mendapatkan penghargaan dan kompensasi yang adil atas karya mereka. Tanpa adanya lisensi yang sah, pemutaran lagu-lagu tersebut dapat melanggar hak cipta, yang berpotensi merugikan baik pemegang hak cipta maupun pengelola karaoke itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam industri ini.

Salah satu upaya preventif untuk melindungi hak cipta adalah dengan memastikan bahwa pengelola karaoke memiliki lisensi yang sah untuk memutar lagu-lagu yang ada di tempat usaha mereka. Hal ini menjadi penting untuk menghindari masalah hukum yang berpotensi muncul jika pemutaran lagu-lagu tersebut tidak memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Selain itu, penting juga bagi pengelola karaoke untuk memperpanjang lisensi apabila masa berlaku lisensinya telah habis. Lisensi yang sah menjadi jaminan bahwa pemutaran lagu dapat berlangsung dengan sah, tanpa melanggar hak cipta. Oleh karena itu, pengelola karaoke perlu memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Seiring dengan itu, pendapat para ahli menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri hiburan, termasuk karaoke, sangat krusial agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pihak pencipta lagu serta pengelola usaha karaoke.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2004), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, hukum hak cipta berfungsi untuk mencegah pemutaran lagu tanpa izin yang dapat merugikan pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Menurut Hanriani (2018), kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pengelola karaoke merupakan salah satu faktor penting untuk meminimalisasi pelanggaran hak cipta. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sutikno (2019) yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di bidang musik, termasuk di industri karaoke, tidak hanya memberikan jaminan ekonomi bagi pencipta lagu, tetapi juga membantu menjaga integritas karya seni.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur hak cipta di sektor hiburan, termasuk karaoke, telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 9 ayat 1, pemutaran karya cipta yang melibatkan hak cipta harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Hal ini menegaskan pentingnya lisensi yang sah dalam menjalankan industri karaoke. Namun, dalam praktiknya, pengelola karaoke di banyak daerah, termasuk Bandar Lampung, sering kali mengabaikan kewajiban ini karena kurangnya pemahaman tentang hak cipta. Hal ini juga dibahas oleh Nugroho (2021), yang menemukan bahwa banyak pengelola karaoke yang belum sepenuhnya memahami prosedur untuk mendapatkan izin atau lisensi untuk memutar lagu-lagu yang dilindungi hak cipta.

Edukasi mengenai pentingnya lisensi hak cipta menjadi kunci utama dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hak cipta di industri karaoke. Seperti yang diungkapkan oleh Popp et al. (2018), pendidikan dan sosialisasi mengenai hak cipta sangat penting untuk membangun kesadaran di kalangan pelaku usaha. Tanpa edukasi yang tepat, banyak pengelola karaoke yang tidak menyadari bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan ganti rugi yang besar.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya preventif dalam perlindungan hak cipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung. Penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang telah diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi dan perlindungan hak cipta dalam industri karaoke. Pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya perlindungan hukum hak cipta akan membantu pengelola karaoke untuk memahami kewajiban mereka dalam memperoleh dan memperpanjang lisensi, serta untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku guna mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan pencipta lagu maupun pengelola karaoke itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam pengaturan hak cipta, serta penerapannya dalam industri karaoke. Sedangkan tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan situasi yang ada terkait dengan upaya preventif perlindungan hak cipta lagu di industri karaoke Bandar Lampung. Dalam pendekatan ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola karaoke di Bandar Lampung, lembaga yang berwenang dalam pengelolaan hak cipta lagu, serta ahli hukum yang berkompeten di bidang perlindungan hak cipta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, artikel ilmiah, serta buku yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur hukum, jurnal, serta peraturan yang terkait dengan hak cipta dan industri hiburan. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari para pengelola karaoke dan pihak-pihak terkait, seperti lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola lisensi hak cipta. Data yang telah dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yang mencakup pemilihan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam analisis data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan induktif, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai upaya perlindungan hak cipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi dan perlindungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu merupakan langkah penting dalam menjaga dan menghormati karya cipta para pencipta lagu, terutama dalam industri karaoke di Bandar Lampung. Upaya preventif perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta sebelum hal tersebut terjadi, dengan mengedepankan pencegahan serta memberikan panduan terkait pelaksanaan kewajiban yang dapat menghindari pelanggaran. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), telah melakukan serangkaian upaya preventif guna melindungi hak cipta lagu. Salah satunya adalah dengan mengedukasi para pelaku industri musik, termasuk pemilik karaoke, tentang pentingnya hak cipta dan tata cara pendaftaran serta lisensi lagu.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah melalui program penyuluhan yang melibatkan seminar dan lokakarya. Seminar-seminar yang diselenggarakan oleh lembaga seperti DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, serta LMK di Bandar Lampung, berfokus pada pemahaman hak cipta lagu, prosedur pendaftaran, dan mekanisme perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Program-program tersebut memberikan pengetahuan terkait konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta serta pentingnya menggunakan lisensi yang sah saat menggunakan lagu dalam konteks komersial, seperti karaoke. Edukasi semacam ini sangat krusial karena banyak pemilik karaoke yang tidak sepenuhnya memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu, sehingga seringkali terjadi pelanggaran yang tidak disadari.

Selain seminar, lokakarya juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta lagu, di mana para peserta tidak hanya menerima informasi teoritis, tetapi juga berkesempatan untuk berdiskusi dan mempraktikkan langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melakukan perjanjian lisensi dengan LMK sebelum menggunakan lagu-lagu dalam karaoke secara komersial. Dalam hal ini, pemerintah menekankan pentingnya bagi pemilik karaoke untuk memastikan bahwa lisensi yang digunakan selalu dalam status yang sah dan terdaftar. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang berujung pada tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata.

Di sektor karaoke, perjanjian lisensi yang sah merupakan langkah preventif yang paling utama dalam melindungi hak cipta lagu. Pemilik karaoke, seperti yang terlihat pada kasus di Bandar Lampung, diharuskan untuk membuat perjanjian lisensi dengan pihak yang memiliki hak cipta atau dengan lembaga manajemen kolektif. Sistem perjanjian lisensi ini memungkinkan pencipta lagu mendapatkan royalti yang menjadi hak mereka atas pemanfaatan karyanya dalam karaoke. Perlindungan terhadap hak cipta lagu tidak hanya melindungi hak ekonomi pencipta lagu, tetapi juga hak moralnya, yang seringkali dilupakan. Oleh karena itu, pemilik karaoke diharapkan untuk mendaftarkan lagu-lagu yang digunakan secara komersial dan memperbarui lisensi secara tepat waktu untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta tanpa memerlukan pencatatan ciptaan, pencatatan tersebut tetap memiliki nilai penting dalam pembuktian di kemudian hari. Pencatatan ciptaan di DJKI menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa hukum terkait hak cipta. Dalam konteks ini, perjanjian lisensi yang terdaftar di lembaga manajemen kolektif juga akan memudahkan pembuktian di pengadilan jika terjadi pelanggaran.

Melalui pendekatan preventif ini, diharapkan hak cipta pencipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung dapat terlindungi dengan lebih baik. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan kewajiban dalam menggunakan lisensi yang sah, industri karaoke dapat menghindari pelanggaran dan menciptakan iklim industri musik yang lebih adil dan teratur.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga dan menghormati karya cipta pencipta lagu. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah, melalui penyuluhan, seminar, dan lokakarya, telah berhasil meningkatkan pemahaman pemilik karaoke mengenai kewajiban terkait hak cipta serta tata cara pendaftaran dan perjanjian lisensi yang sah. Edukasi ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran hak cipta yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku.

Salah satu langkah utama dalam upaya preventif ini adalah perjanjian lisensi yang sah antara pemilik karaoke dan lembaga manajemen kolektif (LMK), yang memberikan hak ekonomi dan moral kepada pencipta lagu. Melalui mekanisme ini, hak cipta lagu dapat terlindungi dengan baik, dan pemilik karaoke dapat menggunakan lagu-lagu tersebut secara sah tanpa khawatir terkena tuntutan hukum. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam menghadapi sengketa hak cipta di kemudian hari.

Dengan pendekatan preventif yang berfokus pada edukasi, pendaftaran, dan perjanjian lisensi, diharapkan industri karaoke di Bandar Lampung dapat berkembang dengan lebih teratur dan adil, menciptakan iklim yang mendukung perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu. Hal ini juga akan mendorong pemanfaatan karya cipta yang sah, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan industri musik secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2019). *Pemetaan penggunaan media sosial oleh masyarakat Jakarta dalam pemilu*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-23.
- Castells, M. (2007). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, R. (2018). Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman dalam upaya kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182-206.
- Farid, S. (2023). *Dinamika media sosial dalam Pilkada DKI Jakarta*. *Jurnal Politik dan Media Sosial*, 10(2), 55-68.
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 98-113.
- Hanriani, D. (2018). *Penerapan perlindungan hak cipta dalam industri musik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Juditha, F. (2019). Media sosial dan partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Komunikasi Politik*, 3(1), 50-63.
- Karpf, D. (2012). *The MoveOn effect: The unexpected transformation of American political advocacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Lestari, D. (2019). Peran media sosial dalam pembentukan opini publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 102-115.
- Lestari, D. L., et al. (2024). Dinamika sosial media dalam pemilu: Kasus Jakarta. *Jurnal Analisis Sosial*, 18(1), 15-28.
- Manuel Castells. (2007). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.
- Nugroho, I. (2021). Tantangan pengelola karaoke dalam mematuhi lisensi hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 45(3), 111-127.

- Popp, D., et al. (2018). Educational approaches to copyright protection in the digital age. *International Journal of Information Management*, 38(2), 115-125. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.11.004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahman, F., Hadi, P., & Utama, I. (2022). Dinamika media sosial dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Politik dan Media Sosial*, 10(3), 45-56.
- Sellita, D. M. (2022). Pengaruh media sosial dalam mempengaruhi pandangan politik masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 44-60.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutikno, A. (2019). *Hak cipta dalam perspektif hukum bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.
- Suryo, S., & Aji, T. (2020). *Peran teknologi informasi dalam komunikasi masyarakat*. Yogyakarta: Andi Publisher.